



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	Indopos	Pos Kota	Warta Kota

## DKI Perketat Pengadaan Barang dan Jasa

**JAKARTA** – Pemprov DKI Jakarta akan memperketat pengadaan barang dan jasa dengan meningkatkan kredibilitas, integritas, dan akuntabilitas. Ini mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) No 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa.

Perpres ini efektif diberlakukan 1 Juli mendatang sehingga saat ini Pemprov DKI mengencarkan sosialisasi kepada para pejabat. "Kita punya kesempatan sampai Juli. Keinginan kita untuk terus meningkatkan *credibility, integrity, dan accountability* dari proses pengadaan barang dan jasa," ujar Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno di Balai Kota DKI Jakarta kemarin.

Menurut dia, belakangan ini banyak sekali kegiatan pengadaan barang dan jasa yang menjadi perbincangan di masyarakat, padahal intinya Pemprov DKI berupaya terus meningkatkan penyerapan anggaran. Kegiatan tersebut seperti pengadaan tong sampah dari Jerman, kasus pohon plastik dan lampu bias.

pengadaan melalui sistem informasi. Para pejabat dipersilakan untuk membicarakannya sehingga semuanya berbasis elektronik sekaligus transparansi publik. Ini merupakan komitmen dalam membangun pemerintahan di Jakarta.

"Mudah-mudahan lebih bisa berkeadilan, bisa juga menghadirkan satu sistem pengadaan barang dan jasa yang mendorong perekonomian. Selain itu, meningkatkan pelayanan publik dan menciptakan lapangan kerja," ujar Sandi.

Pengamat perkotaan Universitas Trisakti Nirwono juga menuturkan, dari ramainya perbincangan mengenai pengadaan pohon plastik dan lampu bias serta tong sampah, tidak

menutup kemungkinan akan muncul kasus kasus pengadaan barang lainnya. Untuk itu, sudah seharusnya Pemprov DKI beserta satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait menjelaskan dengan rinci penggunaan anggaran, alasannya, serta manfaat bagi kota dan warga Jakarta. Bukan defensif, apalagi mencari-cari alasan pembenaran.

Apabila alasannya kuat dan bisa diterima masyarakat, tentu tidak akan bermasalah. Setiap anggaran pengadaan barang ini lolos tentunya sudah atas sepengetahuan gubernur. Gubernur sebelumnya sudah merinci sehingga apabila ada anggaran

tidak masuk atau dibuat-buat bisa langsung dicoret. "Jadi, DKI sangat siap menjalankan Perpres No 16 Tahun 2018 apabila ada komitmen dari pemimpinnya dalam menyusun kegiatan," kata Nirwono.

Sebelumnya, untuk mencegah praktik korupsi di lingkungan Pemprov DKI diluncurkan Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi (Renaksi) di Balai Kota DKI Jakarta beberapa waktu lalu.

Ketua Komite Pencegahan Korupsi Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) DKI Jakarta Bambang Widjojanto mengatakan, program penyelamatan aset pemerintah daerah merupakan salah satu target utama dalam Renaksi Pemberantasan Korupsi.

Pada 2016, laporan keuangan Pemprov DKI oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mendapat status Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Itu karena adanya permasalahan aset pada pencatatan kepemilikan dan pemanfaatan. "Jumlah aset Pemprov DKI saat ini mencapai Rp400 triliun, namun banyak aset belum jelas status keberadaannya. Tidak tercatat, belum bersertifikat, bahkan hilang dialih orang lain," tandasnya.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menuturkan, Renaksi Pemberantasan Korupsi merupakan kerja sama antara Pemprov DKI dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) demi memperkuat pemberantasan korupsi di Jakarta. Renaksi Pemberantasan Korupsi

juga berisi daftar rencana dan target capaian di berbagai sektor mulai perencanaan penganggaran keuangan, pengadaan barang dan jasa, pelayanan masyarakat, pengelolaan aset daerah, hingga pengawasan di SKPD.

Renaksi Pemberantasan Korupsi sangat penting bagi Pemprov DKI karena dia menyadari Jakarta memiliki beberapa faktor yang membuka peluang terjadinya praktik korupsi. Apalagi, DKI memiliki anggaran besar dan belanja aktivitas yang begitu banyak.

Salah satu program yang menarik dalam Renaksi Pemberantasan Korupsi yakni pengembangan mekanisme daring data *sharing* antara Dinas Penanaman Modal Pelayanan Satu Pintu dan berbagai SKPD terkait.

• bima setiyadi

**Mudah-mudahan lebih bisa berkeadilan, bisa juga menghadirkan satu sistem pengadaan barang dan jasa yang mendorong perekonomian.**

SANDIAGA UNO  
Wakil Gubernur DKI Jakarta

Adanya Perpres No 16 Tahun 2018 akan banyak mendorong transparansi, perencanaan, dan sistem rencana untuk



Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 8



SUBBAGIAN ITUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

# DKI Perketat Pengadaan Barang dan Jasa

## MAKSIMALKAN ANGGARAN

Pemprov DKI Jakarta akan memaksimalkan APBD 2018 untuk kesejahteraan rakyat. Tentunya dengan mengedepankan transparansi anggaran.

- Perkiraan RAPBD Perubahan 2018 Rp81,43 triliun
- Proyeksi APBD 2022 Rp115,16 triliun
- Belanja Daerah Rp108,86 triliun
- Penerimaan Pembiayaan Daerah Rp13,69 triliun
- Pengeluaran Pembiayaan Daerah Rp6,29 triliun

### PENDAPATAN DAERAH TERDIRI ATAS

**RP101,47 TRILIUN**

- Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah **Rp13,70 miliar**
- Dana Perimbangan **Rp31,18 triliun**
- PAD Rp70,27 triliun** (pajak daerah Rp61,63 triliun, retribusi daerah Rp636,27 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp1,17 triliun, dan lain-lain PAD yang sah Rp5,77 triliun)

### PENINGKATAN INTEGRITAS APARATUR

- Mendorong pencapaian opini audit BPK terhadap 1 aparat Keuangan Daerah dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP); pencapaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan predikat AA.

### PRIORITAS PEMBANGUNAN 2017-2022

#### PEMBANGUNAN EKONOMI DAN INFRASTRUKTUR

- Peningkatan kewirausahaan dan keseriusan kerja melalui upaya menjadikan *Great Kecamatan One Center of Entrepreneurship (GOCCE)* di 4 kecamatan sebagai penggerak utama wirausaha yang mewujudkan 200 GOC pewirausaha dan 200.000 lapangan kerja.
- Pembangunan transportasi melalui pengintegrasian angkutan berbasis jalan dan air melalui skema *One Karis One Trip (OK One)*; mengoperasikan MRT fase II Lebak Bulus - Bundaran HI dan membangun MRT fase II (Bundaran HI - Kampung Bandan); Mengoperasikan LRT fase I (Kelapa Gading - Velodrome) dan membangun LRT fase II; mengoperasikan sistem jalan berbayar secara elektronik (ERP) pada 4 koridor jalan arteri.
- Pengembangan transit oriented development (TOD).
- Pertwejian perumahan melalui fasilitasi 250.000 warga Jakarta yang memenuhi kriteria/persyaratan memiliki rumah sendiri melalui skema DP mandiri dan pendirian BLUD perumahan rakyat.

#### PEMBANGUNAN MANUSIA

- Peningkatan pendidikan yakni menurunkan tingkat kemiskinan sekitar 1% dari 3,78% pada 2014 menjadi 2,78% pada 2022 melalui pengurangan beban pengeluaran dari peningkatan produktivitas masyarakat miskin.
- Peningkatan kualitas pendidikan baik di sekolah, madrasah, pesantren, ataupun satuan pendidikan nonformal lainnya termasuk menyosialisasikan guru dan tenaga pendidik; pembelian KJP Plus; tidak ada gedung sekolah rusak.
- Peningkatan kualitas pembangunan kesehatan dalam rangka pemenuhan 100% Cakupan Pelayanan Kesehatan Universal (100% Universal Health Coverage) dan mengembangkan layanan *One Health One Outstanding Care (UK UCAHE)*.

Survei REKAD 2017-2022